

# KONDISI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO 1987-2004

Zain Nur Rusidi  
SMA N 1 Sukoharjo

---

## ABSTRACT

*United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan) is a party founded on January 5, 1973 as a combination of four Islamic party in those days, namely Nahdlatul Ulama (NU), Muslim Party of Indonesia (Permusi), Party of Sarekat Islam Indonesia (PSII), and Party of Persatuan Tarbiyah Indonesia. At every election, the PPP vote is always up and down. Factors affecting the decline in the PPP vote in every election is a protracted internal conflict, lack of preparation in dealing with elections, enactment of a single principle, member withdrawal done by NU, multi-party system re-enactment. While the factors influencing the rise in the PPP vote in every election is the easing of internal conflict in the United Development Party, the more vocal of the United Development Party (FPP) in the House, the PDI internal conflict.*

Key Word: general election, political party, PPP

## ABSTRAK

*Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai gabungan dari empat partai Islam pada masa itu, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Permusi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada setiap pemilihan umum, suara PPP selalu naik turun. Faktor yang mempengaruhi menurunnya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah konflik internal yang berkepanjangan, kurangnya persiapan dalam menghadapi Pemilu, diberlakukannya asas tunggal, pengembosan oleh NU, berlakunya kembali sistem multi partai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi naiknya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah meredanya konflik intern Partai Persatuan Pembangunan, semakin vokalnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPR, adanya konflik intern PDI.*

Kata kunci: Pemilihan umum, partai politik, PPP

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Gagasan demokrasi ini tercantum jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasal di dalam batang tubuhnya. Hal ini juga terdapat dalam sila keempat yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Dalam pasal 1 ayat 2 dalam batang tubuh UUD 1945 ber-

bunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar."

Berdasarkan UUD 1945 di atas, maka jelas terlihat bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat harus dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR).

Pemilu sebagai perwujudan ke-  
daulatan rakyat. Di Indonesia, Pemili-  
han Umum dilaksanakan setiap lima  
tahun sekali jika tidak terdapat hal-hal  
yang menyebabkan Pemilu dilaksana-  
kan lebih cepat atau diundur. Hal ini  
seperti pada Pemilu 1999 yang dilak-  
sanakan tiga tahun lebih awal karena  
adanya reformasi. Asas Pemilu adalah  
Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia  
serta dua asas lain yaitu Jujur dan Adil  
(Luber dan Jurdil).

Pemilu adalah salah satu prestasi  
yang sering dibanggakan oleh pemerin-  
tahan Orde Baru. Selama 32 tahun pe-  
merintahan Soeharto Indonesia telah  
melaksanakan Pemilu sebanyak enam  
kali. Dilihat dari segi kuantitas ini me-  
rupakan prestasi, terutama jika dibanding-  
kan dengan masa sebelumnya (Orde  
Lama) yang hanya mampu melaksana-  
kan sekali Pemilu. Pemilu dianggap se-  
bagai perwujudan dari penggunaan hak-  
hak dan partisipasi rakyat dalam  
bidang politik, hal ini merupakan re-  
feksi paling jelas atas tumbuhnya de-  
mokrasi.

Walaupun perbedaan Orde Baru  
dan Orde Lama adalah sesuatu yang  
jelas, namun persamaan antara  
keduanya dalam beberapa hal juga cu-  
kup jelas. Hal ini sering diabaikan,  
karena selama Orde Baru berkuasa  
adanya pemikiran bahwa Orde Baru  
adalah alternatif yang lebih baik dari-  
pada Orde Lama. Dalam karya M. Rusli  
Karim (1999: 62) tertulis pendapat Lid-  
dle mengenai tiga ciri yang menonjol  
dari Orde Baru yang membuat orang  
optimis akan keberhasilan rezim ini.  
*Pertama*, menonjolnya golongan teknok-  
rat, yaitu pakar ekonomi profesional  
berpendidikan Barat. *Kedua*, dominasi  
ABRI pada politik tingkat tinggi dan  
tiadanya oposisi sehingga stabilitas  
politik bisa terjamin. *Ketiga*, birokrasi  
yang kompak.

Salah satu persamaan dari  
keduanya adalah pada UUD 1945 dan  
dasar negara yang digunakan, sedang-  
kan yang membedakan adalah pelak-  
sanaan penafsiran antara keduanya.  
Persamaan dan perbedaan ini juga terli-  
hat pada masa reformasi saat ini. Per-  
samaan lain yang kurang disadari  
antara Orde Baru dan Orde Lama  
adalah pandangan tentang perlunya  
penyederhanaan sistem kepartaian.  
Presiden Soekarno adalah penganjur utama  
adanya penyederhanaan kepartaian  
pada masa Orde Lama, namun hal itu  
belum terlaksana. Ide ini didasarkan  
atas pemikiran bahwa ketidakstabilan  
politik bersumber pada banyaknya jum-  
lah partai. Menurut Karim (1999: 53),  
memperbaiki kembali institusi-institusi  
politik merupakan salah satu tugas be-  
rat Orde Baru untuk menegakkan kem-  
bali kewibawaan pemerintahan setelah  
negara berada di bawah rezim Soekarno  
pada masa Demokrasi Terpimpin atau  
Orde Lama (1957-1965).

Orde Baru yang mewarisi  
pemikiran Soekarno tentang pentingnya  
penyederhanaan kepartaian, jumlah  
partai politik yang sepuluh buah itu  
pada masa setelah peristiwa G30S/PKI  
dianggap masih terlalu banyak, oleh  
karena itu fusi partai adalah suatu keha-  
rusan, fusi ini dilakukan awal tahun  
1973 yang menghasilkan Partai Per-  
satuan Pembangunan (PPP), Golongan  
Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi  
Indonesia (PDI).

Partai Persatuan Pembangunan  
terbentuk oleh empat partai Islam saat  
itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU),  
Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Par-  
tai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan  
Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah  
(PERTI) yang berdiri tanggal 5 Januari  
1973 (30 *Dzulqa'dah* 1392 H) di Jakarta  
melalui deklarasi Hasil Rapat Presidium  
Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi  
Kelompok Partai Persatuan Peman-

gunan yang ditandatangani oleh KH. DR. Idham Khalid (Ketua Umum PBNU), HMS. Mintaredja, SH. (Ketua Umum Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan KH Masykur (Rois Syuriah PBNU) (Aziz, 2006: 88)

Penyederhanaan partai sejak awal telah diperdebatkan, terutama oleh ABRI, karena dikhawatirkan akan menjadi kekuatan yang mengancam ABRI, kelompok ini berpendapat agar partai Islam dibiarkan seperti sebelumnya agar tetap lemah (Karim, 1999: 142). Gagasan penyederhanaan partai politik ini menimbulkan sejumlah masalah baru yang merusak keutuhan dan eksistensi partai politik. Selanjutnya menimbulkan kesan kuat bahwa partai politik baru hasil fusi ini tidak lebih dari partai yang "diciptakan dari atas" dan bukan sebagai pelembagaan aspirasi yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Proses fusi ternyata tidak berhasil memantapkan eksistensi partai sebagaimana yang dibayangkan, bahkan sebaliknya mengalihkan konflik-konflik eksternal yang terdapat diantara sembilan partai politik masa sebelumnya menjadi konflik intern masing-masing partai yang berfusi.

Selama Orde Baru pemerintah merupakan satu-satunya institusi politik yang berpengaruh (Karim, 1999: 58), sehingga pemerintah dapat dengan bebas menentukan kebijakan politik. Selain kebijakan fusi partai, untuk kestabilan politik pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan *floating mass* (massa mengambang) yang artinya bahwa partisipasi pada masyarakat harus dibatasi dan partisipasi politik masyarakat hanya diarahkan pada waktu-waktu tertentu (seperti Pemilu) dan partisipasi masyarakat hanya diarahkan pada bidang atau kegiatan yang mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya kebijakan *floating mass* ini mengakibatkan partai politik,

dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia kehilangan akar dalam masyarakat. Karena partisipasi masyarakat hanya diarahkan dalam bidang ekonomi dan kepengurusan partai politik hanya sampai Daerah Tingkat II (kota dan kabupaten), sedangkan di kecamatan dan desa hanya dibentuk komisis yang melaksanakan kepengurusan bukan membentuk kepengurusan secara otonom. Dalam buku M. Rusli Karim (1999: 148), tertulis pendapat Imawan bahwa kebijakan *floating mass* dilakukan untuk membatasi pengaruh partai ke dalam masyarakat desa.

Kebijakan lain yang menghambat tumbuhnya partai politik adalah asas tunggal yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1985, yaitu berlakunya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) yang ada di Indonesia, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (Aziz, 2006: 5). Kebijakan ini jelas sangat merugikan partai politik terutama Partai Persatuan Pembangunan, karena pada masa itu Partai Persatuan Pembangunan selalu menggunakan Islam sebagai asasnya yang mampu mempersatukan umat Islam di bawahnya. Sehingga Partai Persatuan Pembangunan dipaksa melepaskan asas Islam dan lambang *Ka'bah* yang menjadi simbol dan kebanggaan utamanya. Menurut Pamungkas (2001: 105), demokrasi Pancasila yang dibangun Soeharto tidak jauh beda dengan demokrasi yang dikembangkan oleh negara-negara Blok Timur pimpinan Uni Sovyet Rusia masa lalu. Bedanya Soeharto menggunakan Pancasila, bukan komunisme sebagai ideologi negara satu-satunya.

Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan sendiri dalam sistem politik yang dijalankan Orde Baru berada dalam posisi yang kurang menguntungkan

kan. Sebagai akibat dari adanya keinginan pemerintah Orde Baru kebijakan untuk memperlumah kedudukan partai politik, maka dikeluarkanlah beberapa kebijakan yang hanya menguntungkan Golkar sebagai partai pemerintah. Hal itu merupakan salah satu pelaksanaan konkret karakteristik politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Gaffar (2005: 149-150) menyebutkan ada delapan karakteristik politik Orde Baru yang utama, yaitu: (1) lembaga kepresidenan yang terlampau dominan; (2) rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara; (3) rekrutmen politik yang tertutup; (4) birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; (5) kebijaksanaan publik yang tidak transparan; (6) sentralisasi; (7) implementasi hak asasi manusia yang masih rendah; (8) sistem peradilan yang tidak independen. Dari delapan karakteristik tersebut, terlihat tidak ada sedikit pun yang menguntungkan bagi berkembangnya kehidupan partai politik.

Potensi Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan dukungan secara mayoritas sebenarnya sangat besar. Karena umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dan Partai Persatuan Pembangunan merupakan satu-satunya partai politik yang mengangkat dirinya sebagai partainya umat Islam. Namun hal itu justru kurang disukai oleh pemerintahan, maka dilakukan sandiwara agar Partai Persatuan Pembangunan tidak tumbuh dengan pesat, mulai dari berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak partai sampai campur tangan pemerintah dalam konflik intern partai yang sengaja diciptakan, sehingga Partai Persatuan Pembangunan dikondisikan dalam posisi yang sulit.

Strategi ini ternyata cukup berhasil, karena Partai Persatuan Pembangunan sejak awal tahun 1980-an selalu dirundung konflik internal dan baru mereda pada akhir tahun 1980-an sete-

lah naiknya Ismail Hasan, pada saat yang bersamaan pemerintah dapat dengan leluasa ikut campur di dalamnya dan Partai Persatuan Pembangunan menjadi tergantung pada pemerintah.

Era reformasi memberikan wacana baru bagi perjalanan politik Partai Persatuan Pembangunan. Dalam Muktamar ke empat, Partai Persatuan Pembangunan membahas ulang identitas kepartaiannya. Dalam Muktamar tersebut diperoleh hasil untuk kembalinya Islam tidak sekadar sebagai identitas partai, tetapi sekaligus sebagai asas partai. Karena, setelah berhasil memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya azas partai dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998, Partai Persatuan Pembangunan langsung merevitalisasi ideologi partainya, menjadi berasas Islam dan berlambang *Ka'bah* (Aziz, 2006: 5)

Pada kenyataannya setiap sistem partai selalu menghadapi berbagai tantangan serius dan menentukan sepanjang hidupnya. Terhadap tantangan-tantangan tersebut sistem-sistem partai memberikan tanggapan berbeda-beda sesuai dengan tradisi partai masing-masing (Cipto, 1996: 123)

Perubahan politik secara umum merupakan hal yang bersifat alamiah. Perubahan politik menyangkut persoalan nilai politik, struktur kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem politik (Sastroatmodjo, 1995: 235)

Fenomena inilah yang menarik perhatian penyusun, yaitu bagaimana sebenarnya partai politik, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan setelah adanya kebijakan fusi partai yang mengakibatkan perubahan konflik dari eksternal menjadi internal dan adanya kebijakan *floating mass* yang mengakibatkan partai politik kehilangan akar

dalam masyarakat, serta setelah diberlakukannya asas tunggal Pancasila yang mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan kehilangan pengikatnya yaitu Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Definisi yang hampir sama juga disampaikan oleh Nasir (1988: 55-56), metode sejarah adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan mempertimbangkan dengan teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode sejarah meliputi: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PPP Sukoharjo memiliki perkembangan yang cukup dinamis. Untuk mengetahui perkembangan tersebut sudah selayaknya kita melihat hasil perolehan suara Pemilu, dengan demikian kita dapat mengetahui apakah perubahan itu merupakan penurunan, kenaikan, atau mungkin mengalami stagnasi dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Dalam hal ini kita akan menelusuri kondisi PPP dalam pemilu dengan melihat perolehan suara dan perolehan kursinya dalam setiap pemilu, termasuk di dalamnya kondisi-kondisi

yang mempengaruhinya. Untuk itu penyusun akan menguraikan berdasarkan urutan pemilu tahun 1987 sampai pemilu tahun 2004 di Sukoharjo.

## Pemilihan Umum Tahun 1987

Pemilihan umum ini merupakan pemilu yang keempat kalinya dilaksanakan oleh Orde Baru. Tidak ada yang berubah dengan pemilu sebelumnya (1982), terutama dilihat dari pesertanya (1982), yaitu PPP, Golkar, dan PDI yang telah kali ketiga ini partai-partai tersebut mengikuti pemilu setelah fusi tahun 1973 dan melaksanakan pemilu pertamanya tahun 1977. Pemilu dilaksanakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh Indonesia.

Hasil Pemilu PPP Sukoharjo tahun 1987 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pengembosan suara yang dilakukan NU karena ketidakpuasan NU terhadap MI. Pengembosan dilakukan menjelang pemilu 1987. Para Kiai NU banyak yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan memberikan pengarahannya kepada warganya, mereka membawa pesan sederhana yakni NU tidak wajib lagi memilih PPP dan tidak haram mencoblos Golkar atau PDI.

Penerapan asas tunggal Pancasila juga masih merupakan penyebab menurunnya hasil pemilu tahun 1987, karena pada pemilu tahun ini PPP pertama kalinya menggunakan tanda gambar Bintang setelah dua pemilu sebelumnya menggunakan tanda gambar *Ka'bah* sebagai akibat kebijakan politik asas tunggal Pancasila tersebut. Ketidaksiapan kader dalam melakukan kampanye juga merupakan penyebab menurunnya suara PPP.

Selain itu, konflik intern PPP antara tahun 1980 hingga menjelang Pemilu tahun 1987 juga merupakan pen-

yebab menurunnya suara PPP (Romli, 2006: 64-67), konflik intern tersebut antara lain, *pertama*, konflik antara NU dan MI (Parmusi). Mengenai pernyataan keprihatinan 50 tokoh masyarakat yang disampaikan di DPR (Petisi 50) pada tahun 1980. NU mendukung dan dapat memahami petisi tersebut, tetapi MI mengecam isi pernyataan tersebut. Konflik ini tampak dari adanya Perebutan kursi ketua komisi VII DPR tahun 1980. Selain itu ada pula masalah pengajuan Daftar Calon Sementara (DCS) PPP untuk Pemilu 1982 oleh J. Naro tanpa sepengetahuan anggota DPP yang lain, terutama NU.

*Kedua*, adalah konflik antara Idham Chalid dengan Sjaifuddin Zuhri, Imam Sofwan, dan J. Naro mengenai sikap NU yang menuntut Naro agar menegakkan prinsip-prinsip musyawarah partai pada tahun 1983.

*Ketiga*, konflik antara Idham Chalid dengan J. Naro tentang pembentukan panitia muktamar I tahun 1984. Saat itu J. Naro membentuk panitia muktamar tanpa sepengetahuan Idham Chalid selaku presiden partai sehingga panitia itu dianggap tidak sah.

*Ketiga*, konflik antara Soedardji, Sjaifuddin H, Taman Achda dengan J. Naro mengenai pembahasan pasal 18 ayat 1 RUU Pemilu tentang tanda gambar organisasi politik (1984-1985). Kelompok Soedardji berpendapat bila PPP telah menerima asas tunggal maka tanda *Ka'bah* yang berbau Islam harus diganti, namun pihak Naro menganggap tanda gambar itu (*Ka'bah*) sudah menjadi keputusan muktamar.

*Keempat*, konflik antara "Kelompok 18" (Soedardji dkk) dengan J. Naro. Soedardji membentuk DPP tandingan dengan Syahmanaf sebagai Ketua Umum dan Syarifuddin sebagai Sekjen setelah gagal menggeser Naro dengan isu tanda gambar pada 1985.

*Kelima*, konflik antara Soedardji

dan kawan-kawan dengan J. Naro. Konflik itu tampak dari perubahan pimpinan FPP di DPR tanpa sepengetahuan DPP oleh Soedardji pada tahun 1985. Pengajuan DCS PPP untuk pemilu 1987 pada tahun 1986.

*Keenam*, konflik antara Ridwan Saidi dengan J. Naro mengenai isu "modernisasi". Ridwan berpendapat formula Islam dalam PPP harus dibuang bila PPP menerima asas tunggal, kemudian hal itu diprotes oleh Naro.

*Ketujuh*, konflik antara Soedardji dan kawan-kawan dengan Mardinsyah dan J. Naro mengenai surat DPW Sumatera Utara kepada FPP bahwa mertua Mardinsyah (Sekjen DPP PPP) "berbau PKI". Soedardji berkesimpulan bahwa Mardinsyah berbau PKI juga. Karena itu, Soedardji selaku ketua FPP merecall Mardinsyah dari keanggotaan DPR..

Penurunan jumlah suara PPP Sukoharjo antara Pemilu tahun 1982 dan 1987 sebesar 3.907 suara atau sekitar 2,47%. Seperti disebutkan sebelumnya, penurunan ini lebih disebabkan oleh konflik intern pengurus pusat PPP sekitar tahun 1980-an yang akhirnya berimbas pula pada perolehan suara di daerah, tidak terkecuali di Sukoharjo. Penurunan suara PPP dalam pemilu 23 April 1987 ini seperti apa yang telah diprediksikan sebelumnya.

### **Pemilihan Umum Tahun 1992**

Seperti pemilu sebelumnya, pemilu tahun 1992 diikuti oleh tiga partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu ini dilaksanakan pada 19 Juni 1992. Pada pemilu ini kenaikan jumlah suara PPP terjadi kenaikan sebanyak 9.121 suara atau meningkat 1,51% dibandingkan dengan Pemilu 1987. Tidak jauh berbeda dengan situasi PPP di tingkat

pusat, dalam menghadapi Pemilu tahun 1992 PPP Sukoharjo dihadapkan pada masalah indikasi kecurangan dalam tahapan Pemilu serta ketidakpuasan mengikuti Pemilu.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3/ 1975 tentang partai politik dan Golkar yang salah satu pasalnya memuat peraturan tentang dilaksanakannya *floating mass* dan larangan menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik, sangatlah melemahkan kekuatan PPP yang berbasis pada umat Islam. Dengan diterapkannya hal tersebut PPP Sukoharjo tidak memiliki lagi organisasi di tingkat ranting yang akan mengkoordinasi massanya. Sehingga, secara tidak langsung menghambat hubungan dengan massa pemilihnya. Hal ini mengakibatkan pengkaderan di tingkat desa tidak dapat dilakukan lagi. Dengan demikian hubungan PPP tidak lagi memberi dan menerima akan tetapi hubungan PPP dengan massanya didasarkan pada fanatisme agama di dalam masyarakat yang telah diwariskan oleh partai-partai Islam masa lalu, tidak oleh PPP masa kini.

Dengan tidak adanya kegiatan partai di tingkat kecamatan dan desa, jelas PPP dan PDI di Sukoharjo sangat sulit mencari kader penggerak massa di pedesaan. Hal ini disebabkan karena penggerak massa di pedesaan selama ini dipelopori oleh para aparat pemerintah desa dan kecamatan serta pemuka agama yang pada kenyataannya sudah tidak mungkin lagi diharapkan menjadi kader partai. Di Sukoharjo, mereka telah direkrut oleh salah satu kekuatan politik yang ada dan tidak mungkin mereka tolak karena keterikatan dengan kedudukan dan jabatan yang dimilikinya. Pemuka-pemuka masyarakat di tingkat desa dan kecamatan di Sukoharjo dapat dikatakan hampir semua menjadi pendukung utama Golongan Karya.

Salah satu basis kekuatan umat Islam yaitu masjid yang selama ini menjadi ajang kegiatan masyarakat dan keagamaan. Dengan adanya pelarangan dari pemerintah maka kegiatan partai dan kampanye program partai tidak dapat dilakukan melalui tempat ibadah. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kegiatan partai politik.

### **Pemilihan Umum Tahun 1997**

Pemilu tahun 1997 diikuti oleh tiga partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Keterbukaan politik yang terus bergulir sepanjang tahun pasca Pemilu 1992 sudah tentu berpengaruh terhadap setiap kekuatan politik di Indonesia termasuk dalam hal ini PPP. Keterbukaan dilihat PPP sebagai keadaan politik Orde Baru menuju tahap yang lebih responsif terhadap tuntutan lingkungan internal dan eksternal.

Menjelang Pemilu tahun 1997 hampir semua Pemda Tingkat II se-Jawa Tengah disemarakkan dengan aksi pengecatan warna kuning mulai dari batang pohon, trotoar jalan, hingga gedung-gedung instansi pemerintahan. "Kuningisasi" disosialisasikan melalui anjuran langsung gubernur Jawa Tengah Suwardi kepada seluruh kepala daerah tingkat II yang kemudian dilanjutkan ke seluruh desa. Walaupun sempat mendapat protes dari PPP dan PDI karena dimaknai sebagai bentuk kampanye terselubung OPP tertentu, dalam hal ini Golkar. Hasil Pemilu 1997 Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Pemilu 1997 terjadi kenaikan suara PPP Sukoharjo. Hal ini disebabkan adanya konflik intern PDI, yaitu adanya PDI-Pro Suryadi dan PDI-Pro Mega. Dalam hal ini PDI yang mendukung Megawati (Pro Mega) membentuk

koalisi dengan PPP melalui konsep "Mega Bintang" yang dicetuskan di Solo 27 April 1997. Dalam kompromi politik itu terjadi kesepakatan, bahwa suara PDI-Pro Mega akan mendukung kampanye PPP di Solo dan akan memberikan suaranya untuk Pemilu 1997, dan Sukoharjo juga terkena imbas "Mega Bintang" tersebut. Ternyata hal ini terbukti dengan hasil pemilu Sukoharjo yang naik cukup signifikan pada Pemilu 1997 ini.

Kenaikan suara PPP Sukoharjo sebanyak 71.883 suara atau sekitar 16,54% merupakan angka yang cukup fantastis dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini sebagai bukti adanya kerjasama yang baik antar pengurus di tingkat cabang. Namun, tidak luput pula adanya konflik PDI yang akhirnya memisahkan diri menjadi "Mega Bintang" yang memberikan suaranya untuk PPP. Terjadi kenaikan sebanyak 6 kursi PPP di DPRD Sukoharjo atau naik sebesar 13,33% dari Pemilu tahun 1992.

### **Pemilihan Umum Tahun 1999**

Pemilu kali ini adalah yang pertama setelah runtuhnya rezim Soeharto yang lebih dikenal dengan masa reformasi, yang diganti oleh wakilnya sebagai presiden. Di masa kepemimpinan BJ. Habibie ini terjadi kebebasan dalam segala bidang, khususnya bidang politik. Sehingga hal ini sangatlah menguntungkan bagi para politikus, hal ini terlihat dengan banyaknya bermunculan partai-partai baru dengan berbagai asas dan misi yang mereka bawa.

Pada pemilu 1999 tersebut partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman berjumlah 141 partai politik. Dari sekian itu yang mendaftar kepada Panitia Persiapan Pembentukan Komisi pemilihan Umum (PPPKPU) hanya sejumlah 106, namun yang tidak me-

enuhi syarat untuk diverifikasi oleh PPPKPU sebanyak 46 partai, sedangkan yang layak untuk diverifikasi sejumlah 60 partai. Verifikasi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu administrasi dan faktual. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen pendirian partai, sedangkan verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah untuk mengecek keberadaan pengurus partai politik di provinsi daerah tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya daerah tingkat II berdasarkan dokumen yang ada. Dari 60 partai politik yang lolos verifikasi oleh PPPKPU sejumlah 48 partai dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 1999 oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 1999. (KPU, 2000: 237-238)

Untuk menentukan nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan dengan undian oleh anggota KPU wakil dari partai politik peserta pemilu dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 5 tahun 1999 (KPU, 2000: 239). Partai-partai politik peserta pemilu 1999 tersebut sesuai nomor urutnya adalah sebagai berikut: (1) Partai Indonesia Baru (PIB); (2) Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna); (3) Partai Nasional Indonesia (PNI); (4) Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI); (5) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Kami); (6) Partai Umat Islam (PUI); (7) Partai Kebangkitan Umat (PKU); (8) Partai Masyumi Baru; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); (10) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII); (11) PDI Perjuangan; (12) Partai Abul Yatama; (13) Partai Kebangsaan Merdeka (PKM); (14) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB); (15) Partai Amanat Nasional (PAN); (16) Partai Rakyat Demokratik (PRD); (17) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905); (18) Partai Katolik Demokrat (PKD); (19) Partai Pilihan Rakyat (Pilar); (20) Partai Rakyat Indonesia (Pari); (21)

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi; (22) Partai Bulan Bintang (PBB); (23) Partai Solidaritas Pekerja (PSP); (24) Partai Keadilan; (25) Partai Nahdlatul Ummat (PNU); (26) PNI - Front Marhaenis; (27) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI); (28) Partai Republik; (29) Partai Islam Demokrat (PID); (30) PNI - Massa Marhaen; (31) Partai Murba; (32) Partai Demokrasi Indonesia (PDI); (33) Partai Golongan Karya (Golkar); (34) Partai Persatuan; (35) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (36) Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI); (37) Partai Buruh Nasional (PBN); (38) Partai MKGR; (39) Partai Daulat Rakyat; (40) Partai Cinta Damai; (41) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP); (42) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); (43) Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI); (44) Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI); (45) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Suni Indonesia); (46) Partai Nasional Demokrat (PND); (47) Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI); (48) Partai Pekerja Indonesia (PPI)

Dengan sekian banyaknya partai politik peserta pemilu, mengingatkan kita pada pemilu tahun 1955 dan 1971 yang masih menganut sistem multipartai sebelum adanya fusi partai tahun 1973. Hal ini sangat merugikan bagi ketiga partai hasil fusi 1973. Apalagi bagi Partai Persatuan Pembangunan, karena partai-partai baru yang muncul banyak yang berasaskan Islam dalam pelaksanaan kehidupan politiknya.

Kemunculan partai Islam ini kemungkinan disebabkan oleh reaksi atas tatanan politik yang monolitik yang menafikan keragaman ciri dan aspirasi seperti ditunjukkan oleh asas tunggal (Basyaib, 1999: 35). Simbolisme politik Islam tampak kental pada sebagian besar partai Islam pada masa awal berdirinya muncul karena ketidakpuasan ta-

tanan politik dan munculnya era reformasi.

Pemilu 1999 terjadi penurunan yang sangat drastis dari hasil perolehan suara PPP Sukoharjo. Perolehan suara yang menurun ini diakibatkan munculnya partai-partai baru yang lebih giat dalam melaksanakan kampanye dan pendekatan pada masyarakat. Dari sekian banyaknya partai baru tersebut ada beberapa partai yang berasaskan Islam, sehingga terjadi perpecahan suara Partai Persatuan Pembangunan, karena lebih memilih partai Islam yang lain yang dirasa mampu menampung aspirasi mereka.

Namun, partai-partai Islam yang lain juga belum bisa mengungguli perolehan suara PDI Perjuangan yang terbilang partai baru meski dengan mengusung format Orde Lama peninggalan Soekarno dan Partai Golkar yang merupakan penguasa Orde Baru. Sehingga, dapat dipastikan partai-partai Islam belum bisa bersaing menjadi partai terbesar yang mampu bersaing di Sukoharjo meskipun mayoritas penduduk Sukoharjo adalah umat Islam.

Perolehan suara PPP pada Pemilu 1999 ini terjadi penurunan sebanyak 95.570 suara atau sebesar 23,59%. Penurunan suara yang cukup signifikan, bahkan melebihi PPP adalah Golkar yang pada Pemilu sebelumnya memperoleh 286.597 suara (69,91%) pada Pemilu 1999 ini hanya mendapat 55.349 suara (12,72). Perolehan suara yang sangat luar biasa adalah PDI Perjuangan pimpinan Megawati dengan memperoleh 249.398 suara (57,33%). Jadi dapat diperkirakan suara PPP dan Golkar selain terpecah melalui partai-partai baru yang lebih kecil, suara tersebut juga berkumpul untuk memilih PDI Perjuangan yang menjadi pemenang Pemilu di Sukoharjo, bahkan tingkat nasional. Selain menurunnya suara PPP yang cukup signifikan, hal ini juga

berimbang pada perolehan kursi di DPRD Sukoharjo.

Karena kursi yang diperoleh PPP hanya 2, sedangkan PBB, PK, dan PKB masing-masing hanya memperoleh 1 kursi. Sehingga keempat partai ini membentuk koalisi fraksi di DPRD Sukoharjo dengan nama Partai Bintang Persatuan dan Keadilan Bangsa (BPKB) dengan jumlah 5 kursi. Perolehan kursi PPP Sukoharjo ini menurun sebanyak 8 kursi (17,78%).

#### **Pemilihan Umum Tahun 2004**

Pemilu tahun 2004 adalah pemilu kedua pada masa reformasi. Pemilu ini di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri, yang terpilih menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang dirasa tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya oleh MPR/ DPR. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Partai-partai tersebut ada yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, baik pemilu 1999 atau pemilu masa pemerintahan Soekarno ada pula yang merupakan partai baru yang sama sekali belum pernah mengikuti Pemilu. Partai-partai tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan asas, misi, dan visi yang mereka bawa. Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 sesuai nomor urutnya adalah sebagai berikut: (1) PNI Marhaenisme; (2) Partai Buruh Sosial Demokrat; (3) Partai Bulan Bintang; (4) Partai Merdeka; (5) Partai Persatuan Pembangunan; (6) Partai Demokrasi Kebangsaan; (7) Partai Indonesia Baru; (8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan; (9) Partai Demokrat; (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; (11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia; (12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia; (13) Partai Amanat Nasional; (14) Partai Karya Peduli Bangsa; (15) Partai Kebangkitan Bangsa;

(16) Partai Keadilan Sejahtera; (17) Partai Bintang Reformasi; (18) PDI Perjuangan; (19) Partai Damai Sejahtera; (20) Partai Golkar; (21) Partai Patriot Pancasila; (22) Partai Sosial Indonesia; (23) Partai Persatuan Daerah; (24) Partai Pelopor

Pada pemilu tahun 2004 ini terjadi peningkatan jumlah suara PPP Sukoharjo. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah peserta pemilu yang sebelumnya 48 menjadi 24 partai. Daerah yang menyumbang suara terbanyak adalah Kecamatan Weru, yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik antara Pengurus Anak Cabang dan Ranting di daerah tersebut, selain itu Weru juga membawa calon legislatifnya yang juga telah menjadi anggota DPRD periode sebelumnya, Suryanto, S.H. untuk mereka jagokan kembali dalam Pemilu saat ini, disusul Kecamatan Sukoharjo yang juga mengusung H. Sumarno Budi Pranoto, S.Pd. sebagai calon legislatif yang juga telah menjabat DPRD periode sebelumnya, selanjutnya Kecamatan Kartasura yang masih menjadi basis Islam di Sukoharjo.

Terjadi kenaikan jumlah perolehan suara sebanyak 8.569 suara atau sekitar 1,59%. Naiknya jumlah suara ini karena berkurangnya peserta pemilu yang sebelumnya 48 partai menjadi 24 partai. Namun, kenaikan ini tidaklah signifikan, hal ini disebabkan semakin kuatnya partai-partai Islam yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya seperti PAN dan PKS (sebelumnya PK), dan munculnya kekuatan baru seperti Partai Demokrat yang mampu mengimbangi partai-partai yang telah lahir lebih awal seperti PKB.

Seperti Pemilu sebelumnya PPP membentuk koalisi fraksi di DPRD Sukoharjo, yaitu dengan PKB dan Partai Demokrat. PPP hanya memperoleh 3 kursi dalam DPRD, sehingga dengan

koalisi Kebangkitan Persatuan Demokrat menjadi 9 kursi dalam DPRD Sukoharjo.

Pada Pemilu 2004 terjadi kenaikan jumlah kursi di DPRD Sukoharjo sebanyak 1 kursi, atau sekitar 2,23%. Hal ini karena kenaikan suara PPP yang cukup signifikan yang mampu mendongkrak perolehan kursi di DPRD II Sukoharjo.

## SIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi menurunnya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah konflik intern yang berkepanjangan, kurangnya persiapan dalam menghadapi Pemilu, diberlakukannya asas tunggal, pengembosan oleh NU, berlakunya kembali sistem multi partai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi naiknya perolehan suara PPP dalam setiap Pemilu adalah meredanya konflik intern Partai Persatuan Pembangunan, semakin vokalnya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPR, adanya konflik intern PDI. Sebagai bagian akhir dari karya ini akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan PPP di masa yang akan datang. Saran tersebut antara lain PPP hendaknya mampu menghindari dan mengatasi konflik intern yang berkepanjangan, sehingga hubungan di antara personil pengurus menjadi solid dan akhirnya mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Sikap vokal dan kritis para wakil PPP di DPR hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan agar simpati rakyat terhadap PPP semakin bertambah. PPP harus lebih akomodatif dalam menampung aspirasi rakyat terutama umat Islam, sehingga di era multi partai ini PPP tidak kalah bersaing dengan partai-partai baru yang bermunculan. PPP harus memperhitungkan segala potensi, kele-

mahan, kekuatan, dan hambatan yang akan menyertai perjalanan PPP di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Basyaib, Hamid; Hamid Abidin (ed). 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 Sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet
- Cipto, Bambang. 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- DPP Partai Persatuan Pembangunan. 2003. *Materi Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan: Jakarta, 20-24 Mei 2003*. Jakarta: DPP Partai Persatuan Pembangunan
- DPW PPP Jawa Tengah. 2007. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Periode 2007-2012*. Semarang: DPW PPP Jawa Tengah
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Karim, M. Rusli. 1999. *Negara dan Peninggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- KPU. 2000. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999*. Jakarta: KPU
- KPU Kabupaten Sukoharjo. 2006. *Pemilu 2004, Pilkada 2005 Dalam Data dan Fakta*. Sukoharjo: KPU Kabupaten Sukoharjo
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pamungkas, Sri-Bintang. 2001. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga

- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1992. *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 di Jawa Tengah: Lampiran-lampiran*. Semarang: PPD I Jawa Tengah
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1997. *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 di Jawa Tengah*. Semarang: PPD I Jawa Tengah
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 1999. *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*. Semarang: PPD I Jawa Tengah
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo. 1987. *Pemilihan Umum Tahun 1987 Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo: PPD II Sukoharjo
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press